

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu bidang yang memiliki peran strategis dalam pembangunan sumber daya manusia yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 26, disebutkan bahwa pendidikan nonformal mencakup berbagai program, seperti pendidikan kecakapan hidup, keaksaraan, kesetaraan, serta pelatihan keterampilan, yang bertujuan untuk memberdayakan individu dan komunitas dalam meningkatkan kualitas hidup mereka (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003). Pendidikan nonformal memiliki karakteristik fleksibel dalam pengaturan waktu dan tempat belajar, tidak terikat kurikulum formal, serta bersifat sepanjang hayat sehingga dapat diikuti berbagai kelompok usia (Naryawati et al., 2025).

Salah satu institusi utama dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal di Indonesia adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). PKBM didirikan atas inisiatif masyarakat dan berfungsi sebagai pusat kegiatan belajar yang menyediakan berbagai program pendidikan sesuai dengan kebutuhan lokal. Program-program yang ditawarkan oleh PKBM mencakup pendidikan kesetaraan (Paket A, B, dan C), keaksaraan, pelatihan keterampilan, serta pendidikan kewirausahaan (Septiani et al., 2024). Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 dijelaskan bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan beragam kegiatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang dilaksanakan atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat. Latar belakang pendirian PKBM berakar dari kebutuhan untuk menciptakan kesempatan belajar yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang memiliki akses terbatas terhadap institusi pendidikan formal.

Pendidikan dianggap sebagai alat penting untuk pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup, sehingga PKBM hadir untuk memenuhi kebutuhan tersebut (Kemendikbud, 2013). Jika dilihat perkembangannya di Indonesia, Berdasarkan data dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbudristek, hingga tahun 2025, tercatat terdapat 10.589 PKBM yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 56 berstatus negeri dan 10.533 berstatus swasta. Provinsi dengan jumlah PKBM terbanyak adalah Jawa Barat, dengan 2.317 lembaga. Namun, dari total pkbm di seluruh Indonesia tersebut, hanya sebagian yang telah terakreditasi. Sementara itu, dari sisi jumlah peserta, PKBM melayani sekitar 1,7 juta peserta didik pada semester genap tahun ajaran 2024/2025. Dan tercatat sebanyak 44.471 tenaga pendidik, dengan 18.771 berjenis kelamin laki-laki, 25.700 perempuan. Angka ini menunjukkan bahwa PKBM bukan sekadar pelengkap sistem pendidikan, melainkan telah menjadi garda depan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat secara luas. (Kemendikdasmen, 2025).

Melihat dari jumlah dan sebarannya, PKBM memiliki posisi strategis sebagai lembaga pelaksana utama pendidikan nonformal di Indonesia. Dengan lebih dari 10.589 lembaga yang tersebar di berbagai wilayah dan melayani sekitar 1,7 juta peserta didik, PKBM telah menjelma menjadi instrumen nyata dalam memperluas akses pendidikan alternatif yang fleksibel, berbasis komunitas, dan merespons kebutuhan lokal. Kondisi ini mencerminkan bahwa PKBM bukan sekadar pengganti bagi pendidikan formal, tetapi memiliki potensi besar sebagai motor transformasi sosial, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau oleh layanan negara. Jumlah lembaga yang terus tumbuh dan jumlah peserta yang tinggi juga dapat dibaca sebagai indikator kebutuhan nyata masyarakat terhadap pendidikan yang relevan, terjangkau, dan kontekstual.

Lebih jauh, keberadaan PKBM di berbagai daerah menjadi peluang untuk memperkuat kapasitas kelembagaan secara lebih sistemik. Sebagai pelaksana program kesetaraan, keaksaraan, hingga keterampilan vokasional. Perubahan dunia kerja yang semakin kompetitif menuntut masyarakat untuk memiliki keterampilan yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri kreatif.

Dalam konteks ini, pendidikan vokasional, khususnya yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan nonformal, menjadi salah satu alternatif solusi dalam menghasilkan sumber daya manusia yang siap berwirausaha serta mampu menciptakan lapangan kerja baru. Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) merupakan salah satu bentuk konkret dari upaya tersebut. (Juknis PKW, 2023)

Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) yang diselenggarakan oleh berbagai Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) sebagai penyelenggara kursus keterampilan serta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai lembaga pendidikan berbasis masyarakat di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat agar mampu berwirausaha secara mandiri. Kedua lembaga ini memiliki tujuan kebijakan yang sama. Namun, pelaksanaan PKW pada kedua jenis lembaga tersebut menunjukkan karakteristik yang berbeda, terutama ditinjau dari orientasi program dan karakteristik pesertanya. Program ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis keterampilan, tetapi juga pada pembentukan karakter, pengelolaan usaha, serta pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung keberlanjutan usaha. Salah satu bidang yang banyak diminati dalam pelaksanaan program PKW adalah bidang desain grafis dan cetak digital. Bidang ini berkembang pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap jasa desain dan media promosi digital, baik untuk kepentingan komersial maupun sosial (Zaifullah et al., 2023).

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, desain grafis dan percetakan digital telah menjadi bagian penting dalam industri kreatif nasional. Sub-sektor ini berperan besar dalam mendukung kegiatan promosi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta menjadi wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan kreativitas dan inovasi. Dalam (Indikator Makro Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, 2022) mencatat bahwa industri kreatif, seperti desain grafis dan digital printing, memberikan kontribusi yang berarti terhadap perekonomian nasional serta menciptakan peluang kerja baru bagi masyarakat di berbagai daerah. Dengan demikian, pelaksanaan program PKW bidang desain grafis dan cetak

digital menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan ekonomi kreatif berbasis keterampilan masyarakat.

Namun demikian, keberhasilan pelaksanaan program PKW tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sarana, instruktur, dan peserta, tetapi juga sangat bergantung pada efektivitas komunikasi lembaga penyelenggara dalam mengelola program. Komunikasi menjadi elemen kunci dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Lembaga PKBM sebagai penyelenggara program perlu membangun sistem komunikasi yang efektif, baik secara internal antar pengelola, staff dan instruktur, maupun secara eksternal dengan peserta, mitra kerja, dan pemangku kepentingan lainnya. etiap proses komunikasi tidak terlepas dari berbagai rintangan dan hambatan. Oleh karena itu, strategi komunikasi dirancang untuk mengatasi berbagai kendala tersebut guna mencapai efektivitas komunikasi. Ditinjau dari fungsi dan kegunaannya, strategi komunikasi diperlukan dalam pelaksanaan berbagai program yang ingin dicapai, baik dalam konteks pencitraan, pemasaran, penyebarluasan gagasan, kerja sama, maupun pembangunan infrastruktur. Strategi komunikasi yang dirancang secara matang sangat menentukan tingkat keberhasilan suatu kegiatan. Agar kegiatan dapat berlangsung secara optimal dan lancar, diperlukan strategi komunikasi yang tepat. Strategi komunikasi merupakan proses pengalokasian sumber daya komunikasi untuk mencapai tujuan organisasi, yang mencakup seluruh aktivitas yang dirancang untuk memengaruhi perubahan perilaku (Cangara, 2013).

## **B. Rumusan Masalah**

Di Provinsi Sumatera Barat, PKBM semakin berkembang menyelenggarakan Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW), salah satunya adalah bidang desain grafis dan cetak digital, sebagai respons terhadap perkembangan industri kreatif dan peluang ekonomi lokal. Bidang ini dipilih karena relatif terjangkau, baik dari sisi modal, teknis, maupun aksesibilitas, serta sangat relevan dengan tren digital saat ini, seperti penggunaan media sosial, pemasaran daring, dan permintaan konten visual yang tinggi. Hal ini sejalan dengan kajian

dalam E-Book Ekonomi Kreatif yang menegaskan bahwa subsektor seperti desain grafis, fotografi, animasi, dan konten digital merupakan tulang punggung pertumbuhan industri kreatif di Indonesia, sekaligus membuka peluang ekonomi baru berbasis inovasi dan kreativitas (Rijal, 2023).

Dengan posisi kelembagaan yang tersebar luas, basis peserta yang besar, serta keberlanjutan program dari waktu ke waktu, PKBM di Sumatera Barat memiliki potensi strategis untuk memperkuat akses pendidikan masyarakat berbasis lokalitas. Hal ini selaras dengan temuan dari (Zaifullah et al., 2023), bahwa keberadaan PKBM sebagai pusat belajar berbasis komunitas mampu menjawab kebutuhan masyarakat untuk pendidikan yang lebih fleksibel dan kontekstual dalam era Society 5.0.

Pelatihan semacam ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kompetensi teknis peserta, tetapi juga mengembangkan soft skills seperti kreativitas, manajemen proyek sederhana, dan kemampuan mempromosikan produk secara digital. Pendekatan ini memperkuat konsep pendidikan kewirausahaan berbasis komunitas, dimana pendidikan nonformal seperti PKBM mampu memfasilitasi peserta untuk menjadi lebih mandiri secara ekonomi lewat keterampilan yang tepat guna (Sudjana, 2003). Hal ini selaras dengan penelitian yang menunjukkan bahwa penguatan soft skill kewirausahaan melalui pembelajaran berbasis pengalaman dapat meningkatkan kesiapan berwirausaha (Susilo et al., 2025).

Pendidikan nonformal di Sumatera Barat telah menjangkau puluhan ribu warga melalui keberadaan 261 PKBM yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Namun, distribusi lembaga ini tidak merata. Dalam data dapodik, Kota Padang menempati posisi ketiga terbanyak dalam jumlah PKBM di provinsi ini, setelah Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Lima Puluh Kota. Tingginya jumlah PKBM di Kota Padang menjadi indikator bahwa kebutuhan pendidikan nonformal cukup tinggi, sekaligus mencerminkan dinamika sosial perkotaan yang mendorong lahirnya berbagai program berbasis keterampilan dan pemberdayaan (dapat dilihat pada Lampiran 3).

Sebagai pusat kota di Sumatera Barat, dengan aktivitas ekonomi, teknologi, dan industri kreatif yang berkembang, Kota Padang menjadi lokasi yang strategis untuk mengamati bagaimana lembaga PKBM merespons kebutuhan peserta usia produktif melalui pendidikan keterampilan. Salah satu bentuk respon itu adalah pelaksanaan program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) yang tidak hanya menyediakan pelatihan teknis, tetapi juga bertujuan membentuk mental kewirausahaan bagi peserta. Pendidikan nonformal, yang pada dasarnya berbasis komunitas dan sangat bergantung pada partisipasi sukarela, membutuhkan pendekatan komunikasi yang tidak sekadar informatif, tetapi juga dialogis dan memberdayakan. Strategi komunikasi menjadi komponen penting dalam menjembatani program.

Meskipun PKBM memiliki posisi strategis dalam sistem pendidikan nonformal dan telah menjangkau jutaan peserta di seluruh Indonesia, dapat dilihat di Lampiran 2, penyelenggaraannya masih menghadapi tantangan dalam hal partisipasi dan keberlanjutan. Di Sumatera Barat, misalnya, data pada dapodik menunjukkan bahwa jumlah peserta PKBM mengalami fluktuasi dalam dua tahun terakhir Lampiran 4. Fenomena ini tidak semata berkaitan dengan ketersediaan program atau tenaga pendidik, melainkan juga erat hubungannya dengan bagaimana komunikasi dibangun, baik itu internal maupun eksternal.

Salah satu dugaan yang dapat muncul dari kondisi tersebut adalah bahwa program yang ditawarkan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan atau minat masyarakat. Ketika jenis pelatihan yang disediakan oleh PKBM tidak selaras dengan latar belakang, potensi, atau aspirasi peserta, maka partisipasi pun menjadi tidak stabil. Program yang seharusnya memberdayakan justru terasa jauh dari konteks kehidupan peserta, sehingga keikutsertaan masyarakat cenderung menurun dari waktu ke waktu.

Dalam pengamatan awal peneliti di lapangan menunjukkan bahwa proses komunikasi yang dilakukan masih belum optimal. Perencanaan dan keputusan program masih didominasi oleh pengelola, sehingga anggota lain seperti staff lapangan, instruktur cenderung hanya mengikuti arahan. Selain itu, peserta kerap tidak dilibatkan dalam proses perencanaan program, sehingga kegiatan yang

dijalankan tidak selalu berangkat dari kebutuhan yang dirasakan. Ketika komunikasi hanya berlangsung satu arah yakni dari lembaga kepada peserta tanpa ruang bagi dialog atau penyampaian aspirasi, maka program pun kehilangan relevansinya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lembaga PKBM belum memiliki strategi komunikasi yang tersusun secara sistematis dan terdokumentasi. Pola komunikasi yang berjalan selama ini masih bersifat spontan dan situasional sesuai kebutuhan program, belum terarah pada tujuan strategis lembaga. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan analisis terhadap proses komunikasi lembaga dalam pelaksanaan program PKW guna mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi.

Selanjutnya, hasil analisis tersebut menjadi dasar untuk merancang strategi komunikasi lembaga yang lebih efektif, partisipatif, dan dialogis, sesuai dengan prinsip komunikasi pembangunan dan pendidikan nonformal yang berbasis pada kebutuhan komunitas. Dengan strategi komunikasi yang terarah, diharapkan program PKW tidak hanya mampu meningkatkan keterampilan teknis peserta, tetapi juga dibutuhkan dan dapat memperkuat semangat kewirausahaan serta memperluas dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan sejumlah permasalahan yang disajikan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses komunikasi dilakukan oleh lembaga PKBM dalam pelaksanaan program PKW desain grafis dan cetak digital?
2. Bagaimana rancangan strategi komunikasi lembaga PKBM dalam pelaksanaan program PKW bidang desain grafis dan cetak digital?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Menganalisis proses komunikasi yang dijalankan oleh lembaga PKBM dalam pelaksanaan program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) bidang desain grafis dan cetak digital.
2. Merancang strategi komunikasi lembaga PKBM dalam pelaksanaan program PKW bidang desain grafis dan cetak digital

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini dapat memperkaya informasi yang berkaitan dengan strategi komunikasi.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan untuk Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM), terutama PKBM Suka Maju Sejahtera Kota Padang.

